

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dinamika dan perubahan politik demokratis yang berlangsung dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat pasca-Orde Baru, menjadikan arah yang berlawanan dari konstruksi sosial politik sebelumnya. Arus gerakan *demokratisasi* politik yang berlangsung di Indonesia, yang ditandai dengan lengsernya Soeharto, telah membawa beberapa implikasi dan perubahan yang cukup signifikan dalam struktur dan arah kebijakan politik negara. Pada pemerintahan pasca-Soeharto, baik pada masa Habibie, Abdurrahman Wahid, maupun Megawati, perubahan yang cukup signifikan mulai terlihat yakni semakin dibukanya ruang-ruang kebebasan termasuk kebebasan dalam ekspresi keagamaan, pembentukan organisasi atau perkumpulan politik, serta kebebasan pers. Dalam situasi kebebasan politik yang demikian, berbagai gerakan Islam semakin leluasa memajukan aspirasinya secara terang-terangan, misalnya tuntutan pemberlakuan syariah Islam sebagaimana yang secara ekstensif diperjuangkan oleh beberapa organisasi keagamaan militan.

Meskipun hal tersebut kurang mendapat sambutan, tetapi usaha kearah situ tetap dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui perjuangan sistematis di dalam dataran politik regional. Dari situ wacana yang disuarakan ini kemudian melahirkan banyak kontroversi di klangan publik. Lebih dari itu,

beberapa kelompok keagamaan lain, misalnya Hisbut Tahrir Indonesia (HTI)<sup>1</sup>, juga menyuarakan perlunya ‘melikuidasi’ Pancasila dan diganti dengan dasar Islam sebagai dasar negara.<sup>2</sup>

Jika dibandingkan dengan beberapa gerakan Islam yang lain seperti NII<sup>3</sup> yang juga aktif melakukan gerakan-gerakan aksi massa atau demonstrasi, terdapat suatu yang khas dari yang diusung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yakni tekanan kepada pembentukan Daulah *Khilafah Islamiyah*. Seiring dengan menaikinya isu-isu yang bersangkutan dengan pemberlakuan syariat Islam, maka Hizbut Tahrir merupakan salah satu elemen yang paling aktif dalam melakukan tekanan-tekanan kearah itu.

Kedatangan Hizbut Tahrir ini mempunyai gagasan yang tegas, yakni ingin menyelamatkan umat islam dari kehancuran dengan mengembalikan kepercayaan terhadap segenap konsep Islam dan Hukumnya, sebagai konsep yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan sekedar konsep yang bermanfaat, juga menjadikan fenomena dan kejadian selaras dengan kebenaran yang dikandungnya, yakni melalui dakwah islam dengan politik dalam membentuk kekuatan Islam.

<sup>1</sup> Hizbut Tahrir (selanjutnya disingkat HT) nama lengkapnya adalah Hizb al-Tahrir al-Islami (Partai Pembebas Islam), ia adalah organisasi bersekala Internasional yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1950. Nama “*Tahrir*” (pembebas) diambil oleh An-Nabhani dari gagasan yang ditulis dalam bukunya, *Seruan Membara Kepada Orang-orang Islam dari Partai Pembebasan*. Dan utamanya jargon dari partai pembebas ini adalah mengaggas kembalinya Dawlah *Khilafah Islamiyah*. Lebih jelas lihat *Teologia, Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, (Diterbitkan oleh IAIN Walisongo Semarang 2007), 203.

<sup>2</sup> Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), 10.

<sup>3</sup> NII yang berkembang sebagai gerakan militan Islam produk lokal (*home ground*), yang menyamai rasa permusuhan dan perlawanan terhadap sistem sekuler maupun rezim-rezim penguasanya. HT merupakan gerakan impor, tanah kelahirannya adalah palestina kawasan yang sudah lebih setengah abad terlilit konflik berdarah-darah dengan Israel. Lebih jelas lihat: Ainur rofik, *Membongkar proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2012), x-xii.

HTI memiliki pandangan bahwa ideologi yang benar adalah yang dikonstruksi dari Islam. Dan bentuk negara yang senafas dengan Islam hanyalah negara yang mereka sebut dengan Dawlah *Khilafah Islamiyah*. Bagi HTI, bentuk negara inilah yang tidak saja menjamin penerapan syariat Islam, tetapi juga mampu membebaskan masyarakat dari segala macam krisis.<sup>4</sup> HTI menjunjung tinggi konsep ini dan ingin berjuang dengan segala konsekuensinya.<sup>5</sup>

Di tengah hiruk pikuk proses demokratisasi beserta pernak perniknya, HTI semakin menancapkan kuku pengaruhnya. Mereka aktif berdemonstrasi menentang rezim yang berkuasa dan menuntut pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia. Lebih dari itu, untuk melancarkan aksinya, mereka tak segan melakukan razia-razia dan menggelar aksi kekerasan atas nama Jihad.<sup>6</sup> *Khilafah* dan negara Islam menjadi salah satu keniscayaan di tengah carut marutnya kondisi negara yang semakin hari tak kunjung memperlihatkan keberpihakannya kepada rakyat. Wacana negara Islam berdasarkan (*khilafah*)

<sup>4</sup> Dalam pandangan gerakan HTI UNSRI, berbagai krisis kehidupan yang terjadi akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan yang menyimpang (maksiat). Selama ini telah terbukti bahwa ditengah-tengah masyarakat, termasuk dalam penataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, banyak sekali kemaksiatan dilakukan. Dalam sistem sekuler, Islam hanya ditempatkan dalam urusan individu dengan Tuhannya. Sementara dalam urusan sosial kemasyarakatan agama ditinggalkan. Maka di tengah-tengah sistem sekularistik, lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai Islam, yakni tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik, budaya hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik, dan individualistik, sikap agama yang sinkretik serta sistem pendidikan yang materialistik. Lebih jelas lihat: Kasinyo Harto, *Islam Fundamentalis di Perguruan Tinggi Umum: Kasus gerakan Keagamaan Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), 143.

<sup>5</sup> Lebih jelas Lihat Khalimi, *Ormas-Ormas Islam: Sejarah Akar Theologi dan politik* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 373.

<sup>6</sup> Tetapi menariknya, HTI menolak penggunaan kekerasan fisik dalam setiap gerakannya. HTI misalnya, tidak pernah melakukan aksi sweeping. Strategi yang ditempuh HTI adalah melakukan gerakan intelektual dan sosial yang jauh dari kekerasan fisik, untuk melakukan penyandraan kepada publik terhadap adanya krisis yang berakar dari ideologi sekuler dan kufur. Kalau terpaksa turun ke jalan, HTI pun merancangnyanya dengan rapi. Syamsul Arifin, "Konfigurasi Baru Gerakan Islam", <http://khilafah1924.org/index>, diakses 22 maret 2012.

kemudian menggema secara luas di tengah kegagalan rezim yang berkuasa, yang di dalamnya hanya mewujudkan janji-janji menghadirkan keadilan, akses ekonomi politik yang merata bagi kesejahteraan masyarakat. Alih-alih, mereka terkubur dalam kubangan lumpur korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga nasib jutaan rakyat menjadi bias tak menentu.<sup>7</sup>

Dalam konteks inilah sistem *khilafah* dan penerapan syari'at Islam diperjuangkan oleh HTI. Sistem ini ditawarkan untuk menggeser, menggantikan sistem demokrasi yang dianggap sekuler, sistem ini rawan dimanipulasi dan disalahgunakan oleh segelintir elit demi kepentingan rezim yang berkuasa. *Autokrasi*<sup>8</sup> atau sistem *khilafah* dinilai sebagai sistem yang bersifat *sakral* dan *transendental*.<sup>9</sup> Dalam logika HTI, *sakralitas* dan *transendensi* semacam itu menutup kemungkinan adanya manipulasi kekuasaan. Adanya campur tangan Tuhan diharapkan untuk membersihkan sistem kekuasaan politik sekuler yang manipulatif. Dengan otoritas dan intervensi Tuhan ini pula, dipercaya peluang penyalahgunaan dan manipulasi kekuasaan menjadi berkurang.<sup>10</sup>

Hizbut Tahrir memandang *khilafah* sebagai institusi politik (negara) yang sesuai dengan ajaran Islam, karena telah dipraktikan pada masa Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, model negara versi Hizbut Tahrir secara

<sup>7</sup> Syaharuddin, "Menelaah Visi dan Misi Hizbut Tahrir Indonesia", <http://syaharuddin.wordpress.com/2007/08>, diakses maret 25 maret 2013.

<sup>8</sup> Pemerintahan dengan kekuasaan mutlak pada diri seseorang. Kbbi, 12.

<sup>9</sup> *Sakral*: berarti suci, *Transendental*: menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian KBBI. Hal 467-506.

<sup>10</sup> Oleh: Jodhi Yudon, <http://oase.kompas.com/read/2012/02/17/21355671Fatamorgana.Logika.Khilafah>, diakses 20 maret 2013.

Ideologis merupakan klaim jama'ah yang mengaku sebagai satu-satunya gerakan Islam yang benar dan mampu membangkitkan umat Islam.<sup>11</sup>

Berbicara masalah *khilafah* adalah sebuah fatamorgana. Ia adalah sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Sebab masyarakat ataupun Ormas-ormas Islam di Indonesia sudah berkomitmen dengan NKRI sebagai bentuk negara yang final. Dengan mengkaji *khilafah* versi HTI secara kritis dapat memberikan suatu pemahaman yang komperhensif kepada para masyarakat ataupun pada kalangan akademis, sehingga pemahaman tentang *khilafah* ini nanti tidak ditelan mentah-mentah oleh masyarakat di berbagai kalangan.

Berangkat dari apa yang sudah dijelaskan dalam latar belakang di atas perlu diketahui bahwa Indonesia bukanlah negara Islam, Indonesia adalah negara Demokrasi, dan juga negara yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara. Dapat dikatakan juga bahwa Indonesia adalah negara sekuler yang artinya bahwa disitu terjadi keselarasan antara agama dan negara.

Kaitanya dengan hal itu semua menurut penulis terdapat berbagai permasalahan yang menarik untuk di tuangkan yaitu bagaimana konsep *Khilafah Islamiyah* yang dituangkan oleh HTI di negara Indonesia. Yang tentunya penuh perjuangan yang sangat panjang jika itu sampai terjadi di Indonesia, dan akan menuai berbagai kecaman dari berbagai kalagan pihak pastinya. dan bagaimana

---

<sup>11</sup> Hizbut Tahrir menganalisis bahwa sejak abad ke-19 M telah berdiri berbagai gerakan untuk membangkitkan umat Islam, namun upaya gerakan ini tidak berhasil karena: (1) berpijak pada pemikiran yang umum, tanpa batas, serta tidak jernih, tidak cemerlang dan tidak murni. (2) tidak mengetahui cara atau metode yang tepat bagi pemikirannya. (3) bertumpu pada orang yang belum benar-benar mempunyai niat dan kesadaran yang benar. (4) anggota-anggota gerakannya tidak punya ikatan yang benar, sekedar ikatan organisasi dan setelah mengemukakan kegagalan gerakan-gerakan Islam tersebut, Hizbut Tahrir mengeklaim telah berjalan di rel gerakan islam yang benar. Ainur rofik, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2012), 3.



respon Negara RI (para tokoh islam yang lain) dalam menanggapi hal semua itu.

## B. RUMUSAN MASALAH

Dari gambaran latar belakang diatas penulis akan merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.

1. Bagaimana Doktrin dan Pemikiran HT ?
2. Bagaimana Konsep Khilafah Islamiyah Menurut An-Nabhani ?
3. Bagaimana Pandangan Khilafah Islamiyah Menurut HTI ?
4. Bagaimana Respon Kontekstualisasi Khilafah Islamiyah Dalam Negara RI ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui doktrin dan pemikiran HT tentang adanya kewajiban negara *Khilafah Islamiyah*.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Konsep *Khilafah Islamiyah* yang dirancang HT.
- c. Untuk menanggapi atau merespon tentang adanya negara *Khilafah Islamiyah* yang digagas HT. Bagaimana sikap kita setelah adanya kelompok fundamentalisme yang menerapkan sistem politik Islam yakni dengan konsep *Khilafah Islamiyah*. Dan tentunya kita sebagai warga Indonesia yang beriman dan berilmu kita harus bersikap dewasa dalam menyikapi hal semua itu, tidak seharusnya kita bersikap anarkis

terhadap mereka yang nantinya malah menimbulkan sebuah diskriminasi akhirnya memicu sebuah perpecahan dan kehancuran.

#### D. KEGUNAAN PENELITIAN

##### 1. Akademis

- a. Hasil tulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, yaitu dapat menambah wawasan keilmuan penulis, khususnya masalah isu-isu kontemporer yang menjadi permasalahan Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan referensi bagi khazanah intelektual pendidikan, khususnya program studi perbandingan agama jurusan ushuluddin STAIN Kediri dan untuk STAIN Kediri pada umumnya.
- c. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya mahasiswa, yaitu sebagai bahan informasi bagi mahasiswa tentang wacana Islam kontemporer. Sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengetahui problem-problem keagamaan dalam Islam.

##### 2. Praktis

Hasil dari output penulisan ini diharapkan dapat menjadikan suatu pemahaman yang komperhensif tentang sejarah kelahiran Hizbut Tahrir, dan sampai pada sejarah masuknya Hizbut

Tahrir ke Indonesia dan konsep *Khilafah Islamiyah* yang dibawanya. Yang mana kita ketahui bahwa *khilafah* adalah fatamorgana. Ia adalah sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Dengan mengkaji tentang konsep Khilafah versi HT secara tajam dan kritis diharapkan dapat mampu memberikan pemahaman yang komperhensif dikalangan masyarakat umum, lingkungan akademik ataupun pada kalangan ormas-ormas Islam yang lain pada khususnya. Sehingga pemahaman tentang *Khalifah Islamiyah* semacam ini tidak ditelan mentah-mentah oleh berbagai masyarakat.

#### **E. TELAHAH PUSTAKA**

Untuk menjadikan referensi dan bahan pengembangan skripsi ini, telaah pustaka sangat diperlukan untuk memposisikan penelitian yang dilakukan dan untuk mencari ide dasar penelitian dan teori yang telah digagas oleh peneliti, pengamat dan siapapun yang pernah fokus dalam melakukan penelitian ini, baik dari segi topik, perspektif, pendekatan, dan lain sebagainya pada kurun waktu sebelumnya.

Buku-buku tersebut antara lain adalah, sebuah skripsi mahasiswa Perbandingan Agama, STAIN Kediri dengan judul: “Hubungan Antara Umat Beragama Dalam Pandangan Kelompok Fundamentalisme Islam di Indonesia”, yang ditulis oleh Saiful Mujab, pada tahun 2010-2011. Di dalam skripsi ini dipaparkan beberapa penjelasan terkait masalah definisi Islam



fundamentalisme di Indonesia, sejarah kemunculan, ciri-ciri khas fundamentalisme Islam di Indonesia dan kelompok-kelompok yang digolongkan fundamentalisme Islam di Indonesia. Diantara kelompok islam fundamentalisme yang disebutkan, Hizbut Tahrir juga digolongkan sebagai kelompok fundamental. Disini di jelaskan Hizbut Tahrir (HT) adalah gerakan dan sekaligus partai politik Islam yang bersekala Internasional. Partai ini didirikan pada tahun 1952 oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani di Al-Quds, Palestina. Sayangnya disini tidak dijelaskan mengenai politik yang digunakan oleh kelompok yang berstatus fundamental ini. Menurut penulis menjelaskan tentang pemahaman kelompok fundamentalis yang satu ini tidak menarik jika tidak di jelaskan mengenai konsep *Khilafah Islamiyah*, yang itu merupakan jargon utama dari yang digagasnya selama ini.

Ada lagi yaitu bukunya Ainur rofik yang berjudul: "*Membongkar Proyek Khilafah Ala-Hizbut Tahrir Indonesia*". Yang disitu dijelaskan panjang lebar tentang *Khilafah*-nya HTI, yang menurut penulis disebuah kesimpulan buku itu banyak dijelaskan tentang kekurangan HTI, intinya Ainur rofik sangat menentang sekali dengan pemikiran HTI ini, dan selalu mencari kejanggalan dari pemikiran ataupun pergerakan HTI. Terlepas dari itu semua maka penulis agak kurang setuju juga dengan pendapat Ainur rofik dalam bukunya, dan penulis merasa Ainur rofik ini kurang obyektif dalam penelitiannya. Untuk membedakan dengan penelitian Ainur rofik ini, maka disini penulis lebih mengembangkan kajian yaitu lebih menggali kosep *khilafah Islamiyah* dari pendapat atau pemikiran dari sebuah bukunya Taqiyuddin an-Nabhani sendiri

sebagai pendirinya gerakan ini, sekaligus penggantinya Taqiyuddin an-Nabhani yaitu Abdul Qadim Dzallum (amir ke dua Hizbut Tahrir). Yang menurut penulis dari buku-buku atau pemikirannya ini lebih falid dan lebih murni, terlepas dari pemikiran HTI yang sekarang. Dan disitu juga penulis akan menuangkan respon-respon tentang ketidaksetujuan negara RI ini tentang adanya konsep negara *Khilafah Islamiyah*.

Dalam bukunya Khalimi, yang berjudul: *Ormas-Ormas Islam: Sejarah, Akar Theologi, dan Politik.*, Hizbut Tahrir bermaksud juga membangun kembali “*Daulah Khilafah Islamiyah*” di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT dapat diperlakukan kembali.<sup>12</sup>

Apalagi dalam bukunya Zaki Mubarak yang berjudul: *Genealogi Islam Radikal Di Indonesia: gerakan, pemikiran dan prospek demokrasi*. Disitu HTI menegaskan bahwsanya *khalifah* yang memimpin seluruh umat Islam di muka bumi inilah yang akan menghantarkan umat Islam yang kini terpecah-pecah dalam berbagai bid'ah bangsa-bangsa dan negara nasional menuju satu kesatuan umat yang kembali ke era keemasannya sebagaimana ketika umat Islam memimpin dunia ketika abad-abad yang lalu.<sup>13</sup> Kiranya dalam buku ini menurut penulis penjelasan tentang HTI ini sebenarnya lebih komplit tapi lebih bersifat umum dan masih melebar pembahasannya, apalagi pemahaman tentang *khilafah* masih singkat dan umum.

<sup>12</sup> Kalimi, *Ormas-Ormas Islam: Sejarah, Akar Theologi, dan Politik* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 371.

<sup>13</sup> Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), 251.

Menurut penulis pemabahasan yang menyangkut permasalahan yang sama persis seperti ini masih belum ada, artinya walaupun ada kemungkinan sifatnya masih parsial atau pada bagian-bagian tertentu.

Dari karya-karya tersebut, penulis akan mengembangkan kajian, dan tentunya juga menjelaskan beda, karakter dan posisi penulisan skripsi ini dari literatur yang juga membahas terkait masalah yang sama. Penulis akan menjelaskan mengenai *Konsep Khilafah* ini secara kritis dan cermat. Semua itu dilakukan tidak lain agar menjadi jelas dimana posisi tulisan ini diantara karya-karya lain yang berkaitan dengan ini.

## F. KAJIAN TEORITIK

Kajian teoritik digunakan sebagai landasan atau digunakan untuk mendasarkan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian berupa penjelasan paradigma dan kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian.<sup>14</sup>

Disini penulis menggunakan teorinya Abdul A'la Al-Maududi<sup>15</sup> yang mendasarkan sistem *khilafah* pada pandangan Al-Quran. Teori politik Islam yang dikembanahkan oleh Maududi kelihatan unik, bahkan mungkin “ganjil”. Keunikan atau katakanlah keganjilan teori politik Maududi terletak pada konsep dasar yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan Tuhan,

<sup>14</sup> Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Kediri: STAIN Kediri, 2009), 63.

<sup>15</sup> Abdul A'la Al-Maududi merupakan salah seorang ulama abad ke-20 dan menggagas jamaat Islam (Partai Islam), maududi merupakan seorang ahli filsafat, sastrawan dan aktivis yang aktif dalam pergerakan dan perjuangan Islam diseluruh dunia. Abdul A'la Al-Maududi mendapat ilham dari perjuangan Sayyid Qutb di Mesir yaitu jamaah al-Ikhwan al-Muslimun, sebagaimana Sayyid Qutub, Maududi merupakan tokoh pejuang Islam seluruh dunia. Lebih jelas lihat *Biografi Abdul A'la Al-Maududi*, <http://kholila84.Wordpress.com/2009/06/06biografi-abu-al-a-la-al-maududi/>, Diakses tanggal 8 April 2013.

'bukan' ditangan manusia. Dalam hal ini sangat bertentangan sekali dengan konsep negara demokrasi.<sup>16</sup>

Menurut Maududi bentuk pemerintahan manusia yang benar menurut pandangan Al-Quran, ialah adanya pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan Rasul-Nya di bidang perundang-undangan, menyerahkan segala kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi kepada keduanya dan meyakini bahwa *khilafah*-nya itu mewakili Sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah SWT.<sup>17</sup> Doktrin tentang *khilafah* yang disebutkan di dalam Al-Quran ialah bahwa segala sesuatu di atas bumi ini, berupa daya dan kemampuan yang diperoleh seorang manusia, hanyalah karunia dari Allah SWT. Dan Allah telah menjadikan manusia dalam kedudukan sedemikian sehingga ia dapat menggunakan pemberian-pemberian dan karunia-karunia yang dilimpahkan kepadanya di dunia ini sesuai dengan keridhaan-Nya. Berdasarkan hal ini, maka manusia bukanlah penguasa atau wakil sang pemilik dirinya sendiri, tetapi ia hanyalah Khalifah atau wakil sang pemilik yang sebenarnya.<sup>18</sup>

Dalam masalah *khilafah*, Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa menguasai pemerintahan dengan kekuatan kemudian mengambil bai'at setelah

---

<sup>16</sup> Sistem demokrasi mempunyai makna bahwa rakyat adalah penguasa atas diri mereka. Rakyatlah yang menyusun hukum dan perundang-undangan dan memilih pemimpin mereka. Dengan demikian, sebelum terjadi rekayasa, sistem demokrasi dari dua kekuasaan, yaitu kekuasaan legislative yang dilaksanakan oleh parlemen dan pemerintahan yang melaksanakan keinginan rakyat. Setelah direkayasa, demokrasi terdiri dari tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif yang diwakili oleh parlemen, kekuasaan eksekutif yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan kekuasaan yudikatif yang dilakukan oleh para hakim atau mahkamah agung. Abdul Qadir Zalim, *Pemikiran Politik Islam* (Bangil: Penerbit al-Izzah, 2004), 201.

<sup>17</sup> Abdul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan* (Bandung: Penerbit Mizan Anggota IKAPI, 1996), 63.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 64.

itu secara paksa, bukan-lah cara yang sah menurut syariat bagi berlangsungnya *khilafah*. *Khilafah* yang benar adalah yang berdasarkan kesepakatan dan permusyawaratan para ahli fikir yang memang patut diajak musyawarah.<sup>19</sup> Dalam hal ini Maududi juga sangat setuju dengan pernyataan itu.

Menurut Maududi *khilafah* ini tidak menjadi *khilafah* yang benar selama tidak mengikuti hukum sang pemilik yang sebenarnya. Adapun sistem pemerintahan yang memalingkan diri dari Allah, lalu menjadi sistem yang terlepas bebas, memerintah dengan dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, maka itu bukanlah *khilafah*, tapi itu adalah pemberontakan atau kudeta melawan Sang Penguasa yang hakiki. Pernyataan ini oleh Maududi didasarkan pada Al-Quran Surat Fatir Ayat 39. yang artinya:

*“Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi; maka barang siapa yang kafir, akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhan mereka, dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian bagi mereka belaka. (Q.S. 35:39).*

Dari sebuah teorinya Maududi yang didasarkan pada pandangan Al-Qur'an di atas, diharapkan bisa digunakan sebagai alat atau pisau analisis untuk mengantarkan sebuah permasalahan, kaitanya dengan Konsep *Khilafah* yang digagas oleh HTI. Dan kiranya konsep khilafah seperti apakah yang paling benar menurut pandangan Al-Quran.

---

<sup>19</sup> Ibid, 315.



## G. METODE PENELITIAN

Kata metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodos*” yang dapat diartikan sebagai cara yang teratur dan terpikir baik-baik dalam mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan, dsb); cara kerja yang sistematis memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>20</sup>

### 1. Jenis penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan penelitian studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif<sup>21</sup>-analisis, dimana penelitian ini berfokus pada literatur-literatur baik yang berupa buku, majalah, artikel maupun data yang diperoleh dari situs-situs internet yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara garis besar penelitian ini dibagi dalam dua tahap, yaitu pengumpulan data dan pengelolaan data. Pada tahap pertama, metode yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu menginventarisasi data sebanyak mungkin yang terkait dengan tema. Kemudian pada tahap kedua, mengolah data berupa tema-tema terkait untuk diolah sedemikian rupa sesuai dengan pertimbangan faktor-faktor yang terkait dengan tema.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Nasrudin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), 54.

<sup>21</sup> Deskriptif; penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala yang menunjukkan adanya hubungan tertentu antara gejala satu dengan gejala yang lainnya dalam suatu masyarakat atau populasi manusia. Lihat Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Penerbit Kalimasahada Press, 1988), 13.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202.

## 2. Sumber data

Sesuai dengan penelitian yang saya teliti yakni kaitannya dengan tema islam yang fundamental dengan judul: “KONSEP KHILAFAH ISLAMIYAH MENURUT HIZBUT TAHRIR INDONESIA” dan mengingat penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*), maka sumber yang digunakan adalah buku-buku ataupun literatur yang berupa artikel, majalah ataupun juga data-data dari situs-situs internet.

### a. Sumber primer

Adapun buku-buku yang digunakan sebagai sumber primer atau bahan rujukan utama dalam penulisan ini adalah:

1. Buku karya, Taqiyuddin An-Nabhani yang berjudul: *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*. Yang diterjemahkan oleh: Drs Moh. Maghfur Wachid. Bangil: Penerbit Al Izzah, 1996.
2. Buku karya, Abdul Qadim Zallum<sup>23</sup> yang berjudul: *Pemikiran Politik Islam*, judul asli *Politcal Thought (Afkaru Siyasiyah)*,

---

<sup>23</sup> Syeikh Abdul Qadim Zallum adalah amir kedua Hizbut Tahrir, dia adalah ulama yang *faqih fid din*. Ketegasannya dalam membedakan yang hak dan batil tampak jelas dalam perilakunya, ceramahnya serta kitab-kitab yang ditulisnya. Di samping sebagai aktivis dakwah, peraih *ijazah al alamiyah* (setingkat program doktoral atau S3 saat ini) di bidang *al qadha* (peradilan) di Universitas Al Azhar Kairo, ia pun dikenal sebagai seorang mujtahid. Berbagai ijtihadnya dalam masalah kloning, transplantasi organ tubuh dan masalah dunia kedokteran lainnya ia himpun dalam kitabnya yang berjudul *Hukm Asy Syar' fi Al Istinsakh wa Naql Al A'dhâ' wa Umûr Ukhrâ*. Ulama yang sangat tegas menentang hegemoni sistem kufur kapitalisme Barat dan sistem kufur komunisme timur ini merupakan *amir* (pimpinan) kedua partai Islam ideologis internasional Hizbut Tahrir, sejak 1977-2003. Ia berjuang melanjutkan estafet kepemimpinan sang pendiri dan ideolog HT Al Allamah Syeikh Taqiyuddin An Nabhani, untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam dalam naungan khilafah. Abu Nizham, “Syeikh Abdul

terbitan Khilafah Publication, London. diterjemahkan oleh:

Abu Faiz. Bangil-Jawa Timur: Penerbit Al Izzah, 2004.

b. Sumber skunder

Dalam penulisan ini, penulis tentu akan menggunakan berbagai sumber rujukan yang dipandang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti. Sumber tersebut bisa berupa buku-buku, majalah, surat kabar, artikel, ataupun sumber-sumber bacaan yang diperoleh dari situs-situs internet yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan nilai akademisnya.

3. Metode Analisa atau Pendekatan Data

Penulisan skripsi ini memuat beberapa metode pendekatan:

a. Menggunakan Pendekatan Sejarah

Merupakan suatu proses untuk pencapaian kebenaran menemukan sebuah permasalahan ilmiah berdasarkan fakta-fakta sejarah yang terjadi pada waktu yang sudah lampau.<sup>24</sup> Karakter yang menonjol dari pendekatan sejarah adalah signifikansi waktu dan prinsip-prinsip kesejarahan tentang individualitas dan perkembangan. Melalui pendekatan sejarah, peneliti dapat melakukan periodisasi atau derivasi sebuah fakta, dan melakukan

---

*Qadim Zallum Amir Kedua Hizbut Tahrir*”, <http://harmoko1924.blogspot.com/2011/12//syekh-abdul-qadim-zallum-amir-kedua.html>, diakses tanggal 06 April 2013.

<sup>24</sup> Secara ekstrem dapat dikatakan agama dan keberagamaan adalah produk sejarah. AL-Qur'an sebagian besar berisi tentang sejarah dan ilmu-ilmu keislaman. Peradaban Islam berkembang sedemikian rupa dalam konteks sejarah pula. Karena itu sejarah merupakan bagian dari mata air yang tidak akan pernah kering untuk diambil manfaatnya. Lebih jelas lihat Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 65.

rekonstruksi proses genesis (perubahan dan perkembangan). Melalui sejarah dapat diketahui asal-usul pemikiran, pendekatan, sikap tertentu dari seorang tokoh, madzab, golongan. Diantara fokus penelitian agama dengan menggunakan pendekatan sejarah. Penelitian model ini bisa berupa otobiografinya, pemikirannya, tindakan-tindakannya, pergumpulan hidupnya. Seperti misalnya penelitian yang dilakukan oleh Greg Fealy yang berjudul: *Wahab Chasbullah, Tradisionalisme dan perkembangan politik NU*, dan penelitian Grec Barton dengan judul: *Demokratisasi, Toleransi Agama dan Pancasila: pemikiran Politik Abdurrahman Wahid* (Fealy dan Barton, 1997).<sup>25</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, metode pendekatan sejarah digunakan untuk menyelidiki dan menggali faktor-faktor historis pada konteks sejarah yang terjadi terkait bagaimana gerakan fundamentalis ini, terkait siapa pendirinya, dan bagaimana otobiografinya, pemikirannya, tindakan-tindakannya bagaimana pergumpulan hidupnya, kaitanya dengan HTI.

b. Metode Verstehen

*Verstehen* (*understanding*) berarti memahami, mengerti. Pemahaman, pengertian, yaitu *verstehen* itu sendiri selalu duhubungkan, sebagai relasi oposisi dengan penjelasan (*erklaren*). Dalam pemahaman selalu terkandung penjelasan, demikian juga

---

<sup>25</sup> Ibid., 67.

sebaliknya. Masalah yang perlu diperhatikan adalah dominasinya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Pemahaman dilakukan melalui keseluruhan proses mentalitas, sedangkan penjelasan dilakukan melalui intelektualitas murni. Memahami berarti menemukan dirinya sendiri di dalam diri orang lain. Oleh karena itulah, proses pemahaman disebutkan sebagai cara-cara menggali informasi sesuai dengan kondisi objek, sebagai emik.<sup>26</sup> Seperti diatas, tujuan *verstehen* dan interpretasi pada umumnya adalah pencarian makna. Dalam hal ini digunakan sebagai pencarian sebuah makna terhadap konsep *Khilafah Islamiyah*-nya HTI, Bagaimana agar penulis bisa menjelaskan pemahaman tentang konsep *khilafahnya* HTI, yang tentunya dengan pemahaman mereka (objektif). dengan pendekatan inilah kiranya mampu digunakan sebagai alat untuk menjelaskan dan memahami suatu permasalahan.

c. Metode Deduktif

Merupakan metode mengolah data untuk mencapai kebenaran ilmiah dengan jalan berangkat dari pengetahuan umum yang berupa gagasan atau kerangka teori dari para ahli yang diakui kredibilitasnya dan kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan tentang fakta-fakta dan realita yang bersifat partikular (khusus).

---

<sup>26</sup> Nyoman Kuta Ratna, *Metode Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu-ilmu Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2010), 316-317.



## H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami dan menelaah isi serta maksud yang terkandung dalam tulisan ini, maka penulis memudahkan ke dalam beberapa bentuk bab dan sub-bab. Sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup yang ada, maka pembahasan penelitian ini dibagi menjadi empat bab utama dengan beberapa sub-babnya. Secara kongkrit, empat bab tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab I: Bab ini merupakan tanggung-jawab metodologis dari penulisan penelitian ini, di dalamnya penulis menjelaskan latar belakang, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, nilai guna dari penelitian, penegasan istilah atau judul, kemudian telaah pustaka yang menjelaskan sedikit tentang kajian yang terkait dengan penulisan penelitian ini, kajian teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Bab ini menjelaskan tentang bagaimana doktrin dan pemikiran HT tentang kewajiban mendirikan Negara Khilafah Islamiyah, dan bagaimana pandangan HT tentang kekuasaan dalam Islam.

Bab III: Bab ini berisi tentang permasalahan yang paling inti, yaitu mengupas tentang bagaimana konsep Khilafah menurut HT, apa dasar yang digunakan oleh HT, dan apa tujuan dari pendirian *Khilafah Islamiyah*, dan dilanjutkan bagaimana

respon negara RI tentang adanya Negara *Khilafah Islamiyah* tersebut.

Bab IV: Bab ini merupakan bab terakhir, bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan, kemudian diikuti dengan saran atau rekomendasi penulis untuk sebuah tawaran solusi kita sebagai warga negara Indonesia, bagaimana menyikapi sebuah pergerakan partai politik yang berladaskan Islam yang sangat fundamentalis kaitanya denga Hizbut Tahrir ini.

